

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73 TAHUN 2023
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 PERUNDANG-UNDANGAN DAN NON-PERATURAN
 PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI TAHUN 2023

NO	JUDUL	URGensi PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEB IJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (5 RPermen dan 1 RPedoman)							
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	Berangkat dari ekspektasi Presiden Joko Widodo yang menuntut reformasi birokrasi harus lebih fokus pada hasil, berdampak, dan cepat beradaptasi dalam situasi volatility, uncertainty, complexity,	1. Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2. Permen PANRB 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 3. Permen PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map	Kementerian/ Lembaga terkait pelaksanaan reformasi birokrasi	Penyusunan draft sudah selesai, dan pada tanggal 26 Desember 2022 telah dilaksanakan harmonisasi internal dengan mengundang perwakilan seluruh unit kerja. Saat ini sedang menunggu proses paraf koordinasi.	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEB IJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		ambiguity (VUCA). Road Map sebelumnya dianggap belum menampung isu-isu terkini seperti transformasi digital dan penyederhanaan struktur organisasi dan sistem mekanisme kerja baru	Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 4. Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024		Pada tgl 31 Januari 2023 telah dilakukan harmonisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.		
2	Rancangan Pedoman Menteri tentang Pembangunan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah	Dalam rangka menyesuaikan aturan baru tentang <i>Road Map</i> Penajaman Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 diperlukan pedoman pembangunan reformasi birokrasi bagi instansi pemerintah	Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB	Kementerian/ Lembaga terkait pelaksanaan reformasi birokrasi	Sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pembangunan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi	Lungsuran 2022
3	Rancangan Peraturan Menteri tentang Evaluasi	Dalam rangka menyesuaikan aturan baru tentang Road Map	Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB	Kementerian/ Lembaga terkait pelaksanaan	Sedang dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penajaman Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 diperlukan pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagi instansi pemerintah		reformasi birokrasi	tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penerapan Reformasi Birokrasi	
4	Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Menyikapi perkembangan implementasi Akuntabilitas Kinerja dan kebijakan lain yang mempengaruhi implementasi Akuntabilitas Kinerja, maka diperlukan perubahan terhadap Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2015.	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan	1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Keuangan; 3. Bappenas.	Dalam tahap perencanaan	Deputi Bidang RBKunwas	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.				
5	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Laporan	Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara saat ini	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara	1. KPK 2. Kementerian Dalam Negeri	Dalam tahap perencanaan	Deputi Bidang RBKunwas	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	hanya didasarkan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015, sehingga perlu reformulasi melalui bentuk Peraturan Menteri PANRB. Berdasarkan implementasi SE Nomor 1 Tahun 2015 selama ini, ditemukan beberapa permasalahan yang belum cukup diatur dalam SE tersebut.	Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024; 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 5. Peraturan Komisi				

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 6. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.				
6	Rancangan Peraturan Menteri tentang	Menyikapi perkembangan dan relevansi	1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang	Kementerian PANRB		Kedeputian	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEB IJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Di Instansi Pemerintah	dalam pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah serta simplifikasi mekanisme evaluasi Zona Integritas	Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;				
Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana (2 RPerpres, 1 RInpres, dan 4 RPermen)							
7	Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pengaturan tentang pembentukan LPNK	UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	1. Setkab 2. LAN, dan 3. Instansi terkait lainnya	Telah dilakukan penyusunan R. Perpres LPNK Dan telah dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan Kemensetneg, dan Kumham	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Lungsuran 2022
8	Rancangan Peraturan Presiden tentang Hari dan Jam Kerja	Pengaturan tentang hari dan jam kerja ASN, efisiensi dan efektivitas kinerja ASN	PP 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Setneg, 2. BKN, 3. Setkab, 4. LAN, dan 5. Instansi terkait lainnya	Sudah selesai harmonisasi dan dalam tahap menunggu paraf koordinasi Mendagri	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
9	Rancangan Instruksi Presiden tentang Proses Bisnis Tematik Pada Instansi Pemerintah	Pengaturan tentang gambaran peta proses bisnis (hubungan kerja) antar instansi pemerintah terkait isu-isu tertentu	RPJMN IV Tahun 2020-2024	1. Kementerian PANRB, 2. K/L terkait	dalam proses pembahasan sistematika Inpres tentang Proses Bisnis Tematik	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Usulan Baru
10	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Manajemen SDM SPBE	Merupakan amanat pasal 51 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	1. Kemen PANRB, 2. K/L (Tim Koordinasi SPBE Nasional) dan BKN	1. Telah dilakukan survey Digital Capability Assessment untuk ASN bekerjasama dengan Prospera, dalam proses finalisasi penyusunan R-Permen.PANRB dan akan dibahas dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional. 2. Saat ini sedang dilakukan legal drafting dan persiapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
11	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE	Amanat pasal 53 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE	1. Kementerian PANRB, 2. K/L anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional	Dalam proses penyusunan ranc. Permen PANRB berkerja sama dengan Prospera untuk dapat dibahas dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional. Saat ini telah dilakukan finalisasi rancangan Permen.PANRB tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE dan legal drafting oleh Layanan Hukum.	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Lungsuran 2022
12	Rancangan Peraturan Menteri tentang Fleksibilitas Bekerja Pada ASN	Instrumen pengaturan dalam rangka percepatan implementasi paradigma baru (flexible working arrangement) yg fokus pada, fleksibilitas kerja waktu, tempat jumlah pekerjaan, pemanfaatan teknologi penunjang, dan	PP 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. LAN 2. BKN 3. KASN, dan 4. Instansi terkait lainnya	Telah dilaksanakan pembahasan dengan Kemenkeu, Bappenas dan LAN. Sedang disusun rancangan Perpres tentang Hari dan Jam Kerja, dan telah dilakukan pembahasan dengan Kemen Setneg dan Kemen Kumham. Telah disampaikan nota dinas Deputi ke	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		aplikasi pendukung melalui cloud storage			Menteri dan permohonan izin prakarsa dari Menteri PANRB ke Presiden. Saat ini sedang dalam pembahasan bersama Deputi SDMA agar konsep yang dibangun satu pemikiran		
13	Rancangan Peraturan Menteri tentang Indeks Kelembagaan	Instrumen evaluasi kelembagaan dengan hasil indeks	Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang evaluasi kelembagaan	Seluruh Instansi K/L	Telah di bahas dan mendapat masukan dari tim ahli/pakar dan selesai proses harmonisasi (konfirmasi)	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Lungsura 2022
Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur (1 RPP, 3 RPerpres, dan 6 RPermen)							
14	Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN	Sebagai kebijakan yang mendukung transformasi manajemen ASN.	- UU Nomor 5 /2014 tentang ASN; - PP 94/2021 tentang Disiplin PNS; - PP 79/2021 tentang Upaya Administratif dan Badan	- Kementerian PANRB. - Kementerian Sekretariat Negara. - Kementerian Keuangan - Kementerian Hukum dan HAM.	Dalam perjalanannya terdapat perubahan arah kebijakan dari Pimpinan untuk menyusun RPP Manajemen Pegawai ASN yang akan mencabut PP 11/2017 jo. PP	Deputi SDM Aparatur, Menteri PANRB	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			Pertimbangan ASN; 4. PP 11/2017 juncto PP 17/2020 tentang Manajemen PNS; 5. PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK; 6. PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS; 7. PP 18/2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan Janda/Duda; 8. PP 70/2015 juncto PP 66/2017 tentang JKK dan JKM Pegawai ASN; 9. PP 25/1994 tentang Tanda Kehormatan	5. Badan Kepegawaian Negara. 6. Komisi Aparatur Sipil Negara 7. Lembaga Administrasi Negara.	17/2020 dan PP No. 49/2018		

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			Satya Lancana Karya Satya 10. PP 25/ 1981 juncto PP 20/2013 tentang Asuransi Sosial PNS 11. PP 7/ 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa; 12. PP 12/ 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. PP 50/ 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN; 14. PP 18/ 2016 juncto PP 72/2019				

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			tentang Perangkat Daerah; 15. PP 102/ 2015 juncto PP 54/2020 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI; 16. PP 74/ 2012 juncto PP 23/2005 TENTANG Pengelolaan Keuangan BLU; 17. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 18. PP 69/ 2010 TENTANG Tata Cara Pemberian dan				

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			Pemanfaatan Insentif Pemungutan PDRD 19. PP 41/2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor				
15	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	penyempurnaan fungsi Deputy Bidang Persidangan sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penyempurnaan ketentuan batasan maksimal unit	PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara		Telah disampaikan permohonan harmonisasi rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI pada tanggal 28 Desember 2022	Deputi SDM Aparatur, Kementerian PANRB	Berdasarkan usulan Regulasi

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		organisasi di bawah Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengoptimalkan kelompok jabatan fungsional, dan penambahan ketentuan mengenai Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi					
16	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Menjaga tingkat penghasilan Pegawai KPK yang dialihkan menjadi Pegawai ASN sesuai PP No. 41 Tahun 2020; 2. Melaksanakan amanat Pasal 9 PP No. 41 Tahun 2020	1. UU No. 19 Tahun 2019; 2. UU No. 5 Tahun 2004; dan 3. PP No. 41 Tahun 2020 PP No. 7 Tahun 1977.	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Sekretariat Negara 4. Kementerian Hukum dan HAM 5. KPK 6. BKN	Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus bagi Pegawai KPK di Kementerian Hukum dan HAM	Deputi SDM Aparatur, Kementerian PANRB	Usulan Baru
17	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan	1. Percepatan Transformasi Manajemen ASN sebelum RPP	1. PP Nomor 11 Tahun 2017; 2. PP Nomor 17 tahun 2021;	1. Kementerian PANRB 2. BKN 3. Kemensetneg 4. Kemenkeu	Penyusunan Izin Prinsip dan Izin Prakarsa	Deputi SDM Aparatur/Asdep Peningkatan Kinerja dan Sistem	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Jabatan Fungsional PNS	Manajemen ASN terbit; 2. Simplifikasi Regulasi menghindari hyper regulation	3. PP Nomor 7 Tahun 1977	5. Kemenkumh am 6. Instansi Pembina		Penghargaan SDM Aparatur	
18	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non- Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Instansi Pemerintah	Melaksanakan amanat Pasal 99 dan Pasal 100 PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK	1. UU No. 5 Tahun 2014; 2. PP No. 49 Tahun 2018, dan peraturan perundang- undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Hukum dan HAM 4. Sekretariat Kabinet	Telah dilakukan harmonisasi dan saat ini sedang menunggu persetujuan Presiden melalui Sekretariat Kabinet sesuai Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2021	Deputi SDM Aparatur	Usulan Baru
19	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penataan Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah	Melaksanakan amanat undang- undang No 14, 15, 16 dan 29 Tahun 2022 yang intinya perlu dilakukan penataan ASN	Undang-Undang Nomor 14, 15, 16 dan 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi	1. Kementerian PANRB 2. Kemen Kumham 3. Kemendagri 4. Kemenkeu 5. Setkab	Telah dilakukan harmonisasi	Deputi SDM Aparatur	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Dan Papua Barat Daya	pada Daerah Otonom Baru (DOB). Penataan dimaksud tidak sebatas pelaksanaan seleksi ASN dengan afirmasi, antara lain pelamar dari Orang Asli Papua (OAP) dapat berusia paling tinggi 48 tahun dan bagi Tenaga Honorer eks THK-2 yang ada dalam database BKN dapat berusia paling tinggi 50 tahun.	Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya				
20	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Koordinasi Manajemen Rencana Kerja Bidang Manajemen	Menghasilkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar dan etika profesi, netral dan bebas dari intervensi politik,	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1. Kemensetneg 2. Setkab 3. Kemenkumham 4. KASN 5. LAN, dan 6. BKN	Rancangan revisi Permen 3/2020 sudah disusun dalam bentuk pasal - per pasal, namun masih dalam proses diskusi dan telah melibatkan kementerian Hukum dan HAM	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Aparatur Sipil Negara	serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; Pelaksanaan hubungan fungsional yang sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan Melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) huruf f UU ASN.	3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.				
21	Rancangan Peraturan Menteri tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	1. Kebijakan tentang manajemen talenta sudah tidak relevan dengan transformasi	1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;		Rancangan revisi Permen 3/2020 sudah disusun dalam bentuk pasal - per pasal, namun masih dalam proses diskusi internal	Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		manajemen ASN saat ini; 2. Pembentukan Komite Talenta dan Komite Suksesi agar penetapan talenta lebih transparan dan akuntabel sehingga pemberian predikat talenta sesuai dengan hasil kinerja pegawai ASN; 3. Pengaturan mobilitas talenta dibuat agar talenta terbaik diberikan kesempatan mobilitas lebih tinggi untuk pengayaan jabatan dan sharing knowledge bagi unit yang butuh perbaikan.	2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.				

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
22	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional	Percepatan pemenuhan kebutuhan ASN	Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional		Rancangan PermenPANRB sedang disusun dalam bentuk pasal per pasal dan masih dalam tahap diskusi internal (Mencabut PermenPANRB 29/2021)	Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDMA	Usulan Baru
23	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	1. Adanya transformasi kebijakan terkait jabatan ASN; 2. Perubahan proses bisnis dalam mendukung agenda prioritas Presiden; 3. Penyelesaian permasalahan teknis dalam implementasi kebijakan; 4. Kebutuhan kompetensi sebagai syarat dalam menduduki jabatan serta sebagai tindak	1. PP 11 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	1. BKN 2. Instansi Pembina JF 3. Instansi Teknis Jabatan Pelaksana	Telah disusun NA, selanjutnya akan dilakukan uji substansi dengan berbagai unsur (Mencabut PermenPANRB 38/2017)	Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDMA	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		lanjut dari amanat ketentuan perundang-undangan; 5. Penyelarasan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman; 6. Operasionalisasi kebijakan SKJ dalam materi uji dan pembagian kewenangan antar Instansi Pemerintah.					
Kedeputian Bidang Pelayanan Publik (1 RUU, 1 RPerpres, 3 RPermen, 1 RPedoman)							
24	Rancangan Undang-Undang Pengganti UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Pelayanan publik yang dinamis, perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik, dan arah transformasi birokrasi	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1.DPR 2.DPD 3.Ombudsman RI	Terdapat Naskah Akademik, Draf RUU, dan sudah masuk prolegnas 2020-2024 dgn nomor urut 237	DPD RI	Usulan Baru
25	Rancangan Peraturan Presiden	Pelayanan publik yang dinamis, perkembangan	UU Nomor 25 Tahun 2009	1.Sekretariat Negara	Dalam tahap pembahasan draf perubahan	Deputi Bidang Pelayanan Publik	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Perubahan atas Perpres 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	teknologi informasi dalam pelayanan publik, dan arah transformasi birokrasi	tentang Pelayanan Publik	2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kemenkomarves 4. Pemda Provinsi/Kab/Kota			
26	Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Perubahan Peraturan Menteri No. 92 Tahun 2021)	Arahan Menteri PANRB dalam rangka Penyederhanaan proses					Usulan Baru
27	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	SKM secara elektronik menjadi salah satu instrumen untuk evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2022	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Kementerian Komunikasi dan Informasi.	Telah dilakukan harmonisasi tanggal 7 Desember 2022 dan sedang dilakukan penyelesaian tindak lanjut hasil harmonisasi	Deputi Bidang Pelayanan Publik	Lungsuran2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik				
28	Rancangan Pedoman Menteri Tentang Petunjuk Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tematik	Peningkatan kualitas penilaian PEKPPP pada sektor tertentu	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah	Inventarisir bahan/kajian	Deputi Bidang Pelayanan Publik	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
			Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (1 RPermen, 1 RPedoman)							
29	Rancangan Pedoman Menteri tentang Pencabutan PermenPANRB Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map RB Kementerian PANRB Tahun 2020-2024	1. Perlu adanya penyesuaian road map RB Kementerian PANRB berkenaan dengan penajaman road map RB nasional. 2. Sehubungan dengan ruang lingkup pelaksanaan atas road map RB Kementerian PANRB yang sebatas pada internal Kementerian PANRB, maka selanjutnya akan disusun melalui dokumen	1. Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB; 2. PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 Perubahan atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024	Kementerian PANRB	Akan disusun setelah Perubahan atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditetapkan	Biro MKKS	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEB IJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		pedoman. Sehingga Permen 18/2021 perlu dicabut.					
30	Rancangan Pedoman tentang Road Map RB Kementerian PANRB Tahun 2020-2024	Menindaklanjuti adanya penajaman road map RB nasional tahun 2020-2024 yang berdampak pada perubahan road map RB Kementerian PANRB tahun 2020-2024, diperlukan pedoman road map RB yang memiliki ruang lingkup internal Kementerian PANRB.	1. Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2. PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 Perubahan atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024.	Kementerian PANRB	Akan disusun setelah Perubahan atas PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditetapkan	Biro MKKS	Usulan Baru
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (2 RPermenpan)							
31	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang	Merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2020	1. PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah	Internal Kementerian PANRB	Penyusunan draft sudah selesai, dan pada tanggal 26 Desember 2022 telah	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2020-2024, salah satu yang menjadi isu strategis dalam aspek Sumber Daya Manusia adalah peningkatan objektivitas penilaian kinerja individu terkait dengan tunjangan kinerja pegawai yang diberikan. Salah satu bentuk quick wins internal dalam percepatan isu strategis, bahwa Kementerian PANRB menetapkan pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan capaian kinerja pegawai. Selain	Nomor 17 Tahun 2020; 2. PP Nomor 30 Tahun 2019; 3. PP Nomor 94 Tahun 2021; 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2020; 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2020; 7. Keputusan Menteri PANRB Nomor 500 Tahun 2021; dan 8. Surat Edaran Menteri Nomor 28 Tahun 2021		dilaksanakan harmonisasi internal dengan mengundang perwakilan seluruh unit kerja. Saat ini sedang menunggu proses paraf koordinasi.		

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		itu, terdapat perubahan kebijakan nasional terkait Manajemen Kinerja, Disiplin Pegawai, dan Tugas Belajar, sehingga konsep pemberian tunjangan kinerja berdasarkan IPP dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2020 serta beberapa muatan materi dalam ketentuan tersebut perlu dilakukan penyesuaian.					
32	Pencabutan Permenpan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern	Sehubungan dengan telah dicabutnya Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, sehingga saat ini ketentuan	1. Permenpan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/		Akan disusun RPermenpan pencabutan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Kementerian PANRB	yang mengatur tentang Kode Etik APIP merujuk pada organisasi profesi yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Hal ini sesuai dengan mandat dalam Pasal 52 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa kode etik APIP disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.	03/2008 tentang Kode Etik APIP Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh AAIPI				
Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik (1 RPermen, 1 RKepmen, dan 1 RPedoman)							
33	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang perubahan PermenPANRB	Adanya perubahan substansi terkait dengan mekanisme pelayanan	- UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 - Peraturan Komisi Informasi Republik	Komisi Indonesia Pusat		Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	informasi pada lampiran PermenPANRB No. 45/2012	Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik PermenPANRB No. 60 Tahun 2021				
34	Rancangan Keputusan Menteri PANRB tentang Perubahan KepmenPANRB Nomor 220 Tahun 2012 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	Perubahan materi muatan pada KepmenPANRB Nomor 220 Tahun 2012	1. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008; 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik PermenPANRB No. 60 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan	Komisi Indonesia Pusat		Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	<u>Usulan</u> Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.		Permenpan 39 Tahun 2022				
35	Rancangan Pedoman PANRB tentang Perubahan Pedoman Nomor 4.a Tahun 2022	Perubahan materi muatan dan arahan Menteri PANRB					Usulan Baru
Biro Umum dan Keuangan (5 Peraturan Menteri PANRB, 1 usulan diubah menjadi Pedoman Menteri)							
36	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Kearsipan di Kementerian PANRB	Landasan kebijakan tentang mekanisme penyelenggaraan kearsipan di KemenPANRB, termasuk diantaranya organisasi kearsipan, SDM kearsipan, kewajiban dan kewenangan substansi kearsipan dan unit pengolah, kewajiban tersedianya arsip yang andal, tertib,	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009; 3. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara lain Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019	ANRI	Drafting dan Pembahasan internal. Sebelumnya telah diajukan ND ke unit hukum terkait rancangan dimaksud, tetapi di hold guna mengakomodir sejumlah perubahan.	Unit Kearsipan	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
		dan terpelihara, pengelolaan arsip dinamis, pelaporan arsip dinamis unit kerja, pengelolaan arsip vital dan terjaga, penyusutan menjadi arsip statis atau pemusnahan, hingga pengawasan kearsipan baik eksternal dan internal. Selain itu, sejumlah klausa mengalami perubahan dari rancangan sebelumnya menyesuaikan perubahan signifikan pada proses bisnis, organisasi, tugas fungsi, dan tata kerja Kementerian PANRB.					

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEB IJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
37	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian PANRB	Beradaptasi dengan sejumlah perubahan yang ada pada organisasi dan teknologi di Kementerian PANRB, maka perlu diakomodir sejumlah penyesuaian antara lain perubahan Logo Kementerian PANRB yang berpengaruh terhadap legalisasi naskah dinas dan korespondensi kedinasan, sistem dan aplikasi yang digunakan, penggunaan tanda tangan elektronis, kewenangan pengesahan dan penomoran, hingga perubahan organisasi dan tata kerja.	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009; 3. Keputusan Menteri PANRB Nomor 1021 Tahun 202; 4. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara lain Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019.	Seluruh instansi pemerintah dan organisasi	Drafting dan Pembahasan internal. Sebelumnya telah diajukan ND ke unit hukum terkait rancangan dimaksud, tetapi di hold guna mengakomodir sejumlah perubahan.	Unit Kearsipan, BUMK	Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEB IJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
38	Rancangan Peraturan Menteri tentang Klasifikasi Kearsipan di Kementerian PANRB Diubah menjadi: Rancangan Pedoman tentang Klasifikasi Kearsipan di Kementerian PANRB	Perubahan SOTK dan tugas fungsi Kementerian PANRB yang signifikan memerlukan revisi klasifikasi dokumentasi dan kearsipan sebagai dasar pembuatan naskah dinas, pengelolaan naskah, korespondensi, hingga penyusutan naskah. Selain itu sebagai salah satu penjamin aspek legalitas dan akuntabilitas dokumen yang tercipta.	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009; 3. PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2022; 4. PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2021 ; 5. Keputusan Menteri PANRB Nomor 1021 Tahun 2021; 6. Sejumlah Perka ANRI yang berkaitan antara lain Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019	ANRI	Drafting dan Pembahasan internal. Sebelumnya telah diajukan ND ke unit hukum terkait rancangan dimaksud, tetapi di hold guna mengakomodir sejumlah perubahan. Selain itu, sedang dilakukan konsolidasi masukan atas penyampaian nota dinas terkait pengajuan usulan penyesuaian klasifikasi sesuai tugas dan fungsi organisasi berupa perubahan atau penambahan klasifikasi arsip.	Unit Kearsipan	Lungsuran 2022
39	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non	Mengingat telah beberapa kali terjadi kerugian negara maka penting dan mendesak untuk mengembalikan	1. PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian	1. Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kementerian Keuangan.	Sudah diajukan Nota Dinas Pengajuan Reviu dan Harmonisasi ke Bagian Hukum dengan Nomor Nota Dinas	Biro Umum dan Keuangan	Lungsuran 2022.

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	kerugian negara dan menciptakan disiplin dan tanggung jawab PNS Non Bendahara dengan 2. diperlukan regulasi tentang tata cara penyelesaian kerugian negara non bendahara di lingkungan Kementerian PANRB	Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 2. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.		104/BN.99/2021 Tanggal 29 Desember 2021. Pada tanggal 27 September 2022 telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tgl 28 September 2022 Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat perihal penyampaian kembali rancangan peraturan menteri PANRB untuk disesuaikan dan dibahas kembali di internal Kementerian PANRB		
40	Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan	pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara adalah untuk melindungi dan membenahi Barang Milik Negara yang menjadi aset Negara	1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP	1. Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kementerian Keuangan.	Pembahasan Internal.		Lungsuran 2022

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEBIJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRAKARSA	STATUS USULAN
	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		28/2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah				
Inspektorat (1 usulan permenpan pencabutan, dan 1 Rancangan Pedoman Menteri)							
41	Pencabutan Permenpan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB	Dalam rangka menyesuaikan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 sehingga hal-hal yang diatur dalam Permenpan Nomor 4 Tahun 2015 perlu dicabut dan diperbaharui dengan Pedoman Menteri	1. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi		Akan disusun Rpermenpan pencabutan	Inspektorat Kementerian PANRB	Usulan Baru

NO	JUDUL	URGENSI PEMBENTUKAN	PERATURAN/ KEB IJAKAN TERKAIT	INSTANSI TERKAIT	STATUS RANCANGAN	PEMRA-KARSA	STATUS USULAN
42	Rancangan Pedoman Menteri tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB	Dalam rangka menyesuaikan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 sehingga hal-hal yang diatur dalam Permenpan Nomor 4 Tahun 2015 perlu dicabut dan diperbaharui dengan Pedoman Menteri	Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	-	Akan disusun Rancangan Pedoman Menteri tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB	Inspektorat Kementerian PANRB	Usulan Baru

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI